

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Lembaga perbankan memainkan peran penting dalam sistem keuangan sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, terdapat tiga fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit, dan menyediakan layanan keuangan lainnya. Salah satu lembaga yang signifikan dalam sektor perbankan adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yang bertujuan untuk memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kasmir, 2021).

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tidak menawarkan layanan transaksi pembayaran, melainkan menjalankan aktivitas usaha baik melalui cara konvensional maupun syariah dengan fokus utama pada pengumpulan dana dan penyaluran kredit. Dengan jaringan yang tersebar di daerah pedesaan dan perkotaan, serta pendekatan berbasis komunitas, BPR memiliki keunggulan dalam memahami karakteristik dan kebutuhan lokal dengan lebih baik dibandingkan bank umum (OJK, Statistik Perbankan Indonesia, 2024). Peran BPR sangat penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat, terutama dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil yang seringkali tidak memiliki agunan atau ketentuan administrasi yang diperlukan lebih mudah.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, perdagangan, serta usaha kecil dan menengah. Ketiga sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal dan menjadi pondasi perekonomian masyarakat (BPS, 2024). Penyaluran kredit merupakan fungsi utama dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Penyaluran kredit berkontribusi langsung terhadap peningkatan modal kerja dan investasi sektor usaha mikro dan kecil di Bali. Efektivitas penyaluran kredit oleh BPR sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan UMKM.

Berdasarkan analisis awal dari laporan keuangan pada website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka didapatkan rata-rata nilai penyaluran kredit pada kesembilan BPR yang terdapat di Provinsi Bali periode 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1  
Rata-rata Penyaluran Kredit Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2023-2024

| No | Nama Kabupaten /Kota | Rata-rata Penyaluran Kredit |                 | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|    |                      | 2023                        | 2024            |            |
| 1  | Buleleng             | 129.105.302.714             | 112.071.672.066 | Menurun    |
| 2  | Jembrana             | 3.298.553.000               | 3.653.385.685   | Meningkat  |
| 3  | Tabanan              | 32.785.481.353              | 38.147.033.809  | Meningkat  |
| 4  | Badung               | 48.862.177.492              | 55.842.134.021  | Meningkat  |
| 5  | Gianyar              | 84.141.464.130              | 95.851.275.888  | Meningkat  |
| 6  | Klungkung            | 47.406.380.400              | 51.695.896.992  | Meningkat  |
| 7  | Bangli               | 74.838.056.000              | 72.444.676.144  | Menurun    |
| 8  | Karangasem           | 34.347.470.000              | 37.643.039.983  | Meningkat  |
| 9  | Denpasar             | 274.060.413.545             | 263.218.845.407 | Menurun    |

Sumber: Laporan Publikasi OJK (data diolah)

Berdasarkan data penyaluran kredit di Provinsi Bali selama periode 2023 hingga 2024, dapat dilihat bahwa pada Kabupaten Tabanan, Badung, dan Gianyar mencatatkan kenaikan penyaluran kredit yang konsisten, yaitu sebesar 16,35%,

14,28% dan 13,92%. Di sisi lain diikuti oleh Kabupaten Jembrana, Karangasem, dan Klungkung juga menunjukkan tren positif yaitu sebesar 10,76%, 9,59%, dan 9,05%. Namun demikian, beberapa daerah mengalami penurunan yang signifikan yaitu pada Kabupaten Buleleng, Denpasar dan Bangli menunjukkan penurunan sebesar 13,19%, 3,96% dan 3,20%. Melihat tren ini, Kota Denpasar menjadi sorotan utama dalam penelitian ini karena menunjukkan penurunan penyaluran kredit, meskipun memiliki tingkat PDRB per kapita yang tinggi, yaitu sebesar Rp 80,31 juta dengan peringkat tertinggi kedua di Provinsi Bali. Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan PDRB mencerminkan meningkatnya pendapatan masyarakat yang mendorong konsumsi dan investasi, sehingga semakin tinggi PDRB akan mendorong peningkatan kebutuhan kredit. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi ekonomi wilayah dengan kinerja penyaluran kredit, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penurunan penyaluran kredit ini tidak dapat dilepaskan dari faktor internal dan faktor eksternal perbankan, faktor internal adalah variabel yang dapat diukur dan dikontrol oleh bank. Faktor internal memiliki hubungan langsung dengan operasi sehari-hari dan manajemen bank (Prayuningsih, Yudiaatmaja, & Suci, 2024). Dari aspek eksternal bank, faktor-faktor seperti keadaan ekonomi, tingkat bunga, peraturan pemerintah, dan lainnya berpengaruh pada penyaluran kredit. Selain itu, dari aspek internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, yang dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK), modal yang dimiliki bank untuk memberikan kredit seperti yang terlihat dari rasio solvabilitas atau *Capital Adequacy ratio* (CAR), tingkat pengembalian kredit yang terlihat melalui kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL),

serta *Return On Asset* (ROA) yang berkaitan dengan profitabilitas (Kasmir, 2012). Pada penelitian ini hanya berfokus menggunakan variabel bebas *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mempengaruhi penyaluran kredit. Dikarenakan dalam penelitian Nurfajri dan Mirati, (2024) serta Fakhira dan Purwanto (2022), CAR terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit. Sementara itu, variabel DPK dalam penelitian oleh Wijaya (2023) serta Yudhistira dan Sugiastuti (2023), juga ditemukan memiliki pengaruh yang dominan terhadap penyaluran kredit, sehingga secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan dana pihak ketiga mendorong peningkatan penyaluran kredit oleh bank, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Berdasarkan Wahyuni, Sabir, dan Salijah, (2023), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan ukuran yang menunjukkan cukupnya modal yang diperlukan untuk menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. CAR menggambarkan sejauh mana bank mampu menanggung kerugian, termasuk yang disebabkan oleh aset-aset yang berisiko, seperti risiko kredit yang diberikan. Rasio ini menjadi indikator yang penting untuk mengevaluasi kesehatan permodalan sebuah bank. Nilai CAR yang lebih tinggi mengindikasikan peningkatan kemampuan bank dalam menanggung risiko yang muncul dari operasionalnya. Hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pihak pengawas bahwa bank memiliki modal yang memadai untuk melindungi simpanan nasabah dan menjaga kestabilan keuangan. Namun, jika nilai CAR terlalu tinggi, ini bisa menandakan bahwa bank belum sepenuhnya memanfaatkan modalnya untuk kegiatan yang produktif, seperti penyaluran kredit. Oleh karena itu bank harus menjaga nilai CAR dalam batasan yang sehat, sesuai peraturan regulator, agar dapat menjalankan

fungsi intermediasi dengan efektif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wiriya, Suarmanayasa, dan Sinarwati (2022) yang menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2023) menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, yang menunjukkan bahwa semakin besar rasio CAR, maka semakin kecil kredit yang disalurkan, karena dana modal belum digunakan secara maksimal.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merujuk pada sumber dana yang didapat dari masyarakat luas, yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (Fardillah, Yahawi, & Aulia, 2021). Sumber dana ini merupakan elemen penting untuk operasional bank dan menjadi indikator utama keberhasilan bank tersebut. Tingginya DPK menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap bank. Semakin besar jumlah DPK yang dapat dihimpun, semakin besar pula kekuatan bank dalam memberikan pembiayaan atau kredit, yang dapat memperkuat posisi likuiditas bank saat menjalankan perannya sebagai perantara. Di sisi lain, jika pengumpulan DPK rendah, bank akan menghadapi kesulitan dalam

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Susila (2025) menemukan bahwa DPK memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Zuhri dan Sitanggang (2024) menunjukkan bahwa DPK tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan data pada Lampiran 01, PT BPR Bank Sri Partha Bali, PT BPR Kertiawan, PT BPR Sentral Ekonomi Nusantara pada periode 2023-2024 mengalami peningkatan penyaluran kredit sebesar 58,99%, 33,01% dan 47,19% namun CAR

dari BPR ini turun sebesar 9,21%, 13,81% dan 16,30%. Selanjutnya, PT BPR Shri Gangga Bali, PT BPR Hoki dan PT BPR Dewantara Candradana pada tahun 2023-2024 mencatat kenaikan penyaluran kredit sebesar 19,33%, 24,73% dan 20,79%. Namun terjadi penurunan CAR sebesar 0,97%, 17,63% dan 0,13% *Prudential Regulation Theory*, yang menekankan bahwa ekspansi penyaluran kredit harus didukung oleh tingkat kecukupan modal yang memadai sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam menghadapi risiko kerugian. *Prudential Regulation Theory* berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam aktivitas perbankan, di mana bank diwajibkan menjaga rasio permodalan (seperti CAR) agar tetap di atas ambang batas minimum yang ditetapkan oleh regulator. Ketika CAR menurun, bank seharusnya membatasi penyaluran kredit guna menghindari potensi risiko likuiditas dan kredit bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Saunders dan Cornett (2014) yang menyatakan kehati-hatian dalam menjaga kecukupan modal menjadi bagian penting dari kerangka kerja pengelolaan risiko bank. Selain itu, teori ini juga sejalan dengan penelitian Nurfajri dan Mirati (2024), yang menyoroti bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Ini menunjukkan bahwa selain mengumpulkan dana, bank juga harus memperkuat modalnya untuk bisa terus menyalurkan kredit secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas.

Kemudian, PT BPR Duta Bali dan PT BPR Pande Artha Dewata mencatat penurunan Penyaluran kredit sebesar 4,35% dan 21,12% tetapi mengalami Kenaikan DPK sebesar 13,00% dan 0,14%. Selanjutnya PT BPR Kita Centradana dan PT BPR Parthakencana Tohpati juga mengalami penurunan penyaluran kredit sebesar 0,05% dan 5,57%. Namun DPK meningkat sebesar 4,09% dan 9,48%. Hal

ini tidak sejalan dengan *financial intermediation theory*, yang mengindikasikan bahwa bank berfungsi sebagai perantara keuangan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk DPK dan kemudian menyalurkannya sebagai kredit kepada para debitur. Ketika DPK naik, itu berarti banyak sumber dana yang tersedia di bank. Kondisi DPK meningkat seharusnya mendorong peningkatan penyaluran kredit. Jika yang terjadi sebaliknya, maka fungsi intermediasi bank tidak berjalan secara optimal. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mishkin (2004) yang menekankan pentingnya dana dari masyarakat sebagai pondasi penyaluran kredit oleh bank. Di samping itu, teori ini juga sesuai dengan penelitian Nurfajri dan Mirati (2024) yang menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Dengan kata lain, selain mengumpulkan dana, bank juga perlu memperkuat modalnya agar bisa melakukan penyaluran kredit secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas.

Adanya kesenjangan dalam literatur mengenai CAR dan DPK terhadap Penyaluran Kredit yang terjadi pada BPR di Kota Denpasar mendorong dilakukannya penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit Bank Perekonomian Rakyat di Kota Denpasar Periode 2023-2024”**

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada BPR di Kota Denpasar yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan penyaluran kredit pada BPR di Kota Denpasar Periode 2023-2024.

2. Terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan data.
3. Dibutuhkan penelitian untuk mengetahui Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini membatasi untuk mengungkap pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit Bank Perekonomian Rakyat di Kota Denpasar Periode 2023-2024.

### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada BPR di Kota Denpasar Periode 2023-2024?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada BPR di Kota Denpasar Periode 2023-2024?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada BPR di Kota Denpasar Periode 2023-2024?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada BPR di Kota Denpasar Periode 2023-2024.

- b. Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada BPR di Kota Denpasar Periode 2023-2024.
- c. Menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada BPR di Kota Denpasar Periode 2023-2024.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang manajemen, khususnya manajemen keuangan dan tentang bagaimana CAR dan DPK mempengaruhi penyaluran kredit pada BPR, khususnya di Kota Denpasar. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber penelitian untuk penelitian yang akan datang.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tambahan kepada pihak yang memiliki kepentingan, terutama dalam sektor perbankan. Dengan memahami lebih lanjut tentang bagaimana CAR dan DPK mempengaruhi penyaluran kredit pada BPR, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui akses yang lebih baik ke permodalan, khususnya dalam hal penyaluran kredit.